

TINJAUAN ILMU KEPOLISIAN

(Perspektif Paradigma Ilmu)

Oleh : Bambang Widodo

1. Umum

Akhir-akhir ini, intensitas peranan Polri sangat menonjol di dalam masalah mencari landasan prinsip-prinsip keilmuan untuk memperkokoh kemampuan di dalam mengikuti derap dinamika pembangunan nasional. Gejala yang nampak adalah "intelektual boom" di lingkungan generasi muda Polri mencari ilmu untuk memperluas wawasan dalam mengkaji masalah-masalah empirik sehingga diharapkan mampu menemukan solusi guna menjawab tantangan dimasa yang akan datang.

Langkah positif ini kelak melahirkan creative modernizer selaku perintis yang berjalan di depan untuk berani mendudukkan arah fungsional peranan polisi sehingga nampak benang merah yang memperjelas kedudukannya dalam kehidupan. Suka atau tidak suka keadaan ini sudah bergulir, para ilmuwan polisi yang menempuh sekolah baik di dalam maupun luar negeri telah mulai berkiprah dalam organisasi. Dan sejalan dengan itu pula Polri berbenah diri membangun institut tercinta PTIK melalui pengembangan strata S2 bidang kajian ilmu Kepolisian.

Menyongsong pengembangan strata tersebut melalui wawasan keilmuan saya ingin menyampaikan suatu tinjauan ilmu Kepolisian dari perspektif paradigma ilmu.

2. Konsep Paradigma

Di dalam usaha memahami ilmu Kepolisian maka peranan konsep adalah penting, sebab konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu tersebut merupakan ramuan dasar dan fundamental dalam setiap kajian ilmiah. Suatu konsep adalah pengertian yang menunjukkan sesuatu, pengertian ini dapat dinyatakan dalam bentuk kata, nama, atau pernyataan simbol. Dalam kehidupan ilmiah fungsi konsep paling tidak dapat di kelompokkan ke dalam empat fungsi yaitu:

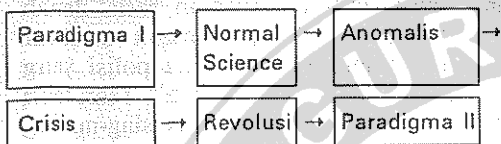
fungsi kognitif yang berkaitan dengan kegunaan konsep tersebut untuk menjadikan orang lebih tahu, lebih mengerti, lebih paham tentang sesuatu yang ditunjuk oleh konsep itu. Fungsi evaluatif, yang berarti bahwa dengan sebuah konsep orang akan lebih mudah mengkatagorikan sesuatu. Fungsi Pragmatik, artinya menunjuk pada sifat yang berhubungan dengan nilai atau hasil yang praktis. Fungsi komunikatif, yang berarti memberitahu atau membuat orang lain menjadi tahu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi konsep adalah untuk memberikan kejelasan dan kesamaan pemahaman terhadap fenomena yang dihadapi. Dalam hal ini tentunya bagi ilmu Kepolisian sendiri apa yang menjadi subject metter yang semestinya dipelajari, persoalan inilah bagi para ilmuwan sering dihadapkan pada tragedi ilmu, dan ini tidak hanya terjadi di negara kita. Antara para ilmuwan dari negeri Paman Sam dengan para ilmuwan negara-negara sosialis pun terdapat perbedaan, ini bisa terjadi karena eksperimen-eksperimen yang diadakan memakai preparat-preparat sosial yang berbeda secara kualitatif dan belum adanya tukar menukar hasil ataupun metodologinya.

Selanjutnya dalam kaitan paradigma sebagai suatu konsep, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya *The Structure Of Scientific Revolution* (1962).

Sebagaimana diketahui karya Thomas Kuhn menempati posisi sentral di tengah-tengah perkembangan ilmu sosial selama kurang lebih dua dekade terakhir ini. Sebabnya, karena melalui karyanya itu Kuhn menawarkan suatu cara yang bermanfaat terhadap para ilmuwan sosial dalam mempelajari disiplin ilmu mereka. Kuhn sendiri sebenarnya bukanlah seorang ilmuwan sosial, melainkan seorang ahli ilmu alam. Dalam karya yang termasyhur ini, Kuhn sebenarnya menentang asumsi yang berlaku

umum di kalangan ilmuwan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Kalangan ilmuwan pada umumnya berpandangan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu terjadi secara kumulatif, pandangan seperti ini mendasarkan pemikiran bahwa semakin mantapnya ilmu adalah dengan dukungan penerbitan buku-buku teks. Menurut Thomas Kuhn perkembangan ilmu pengetahuan bukanlah terjadi secara kumulatif tetapi terjadi secara revolusi.

Model perkembangan ilmu pengetahuan menurut Kuhn adalah sebagai berikut :



Walaupun pandangan Kuhn tentang paradigma belum menampakkan konsistensi, terbukti dari pendefinisian paradigma dengan arti yang berbeda-beda. Namun Masterman mencoba merevisi konsep paradigma Kuhn (yang banyaknya dua puluh satu) ke dalam: 1) paradigma metafisikai; 2) paradigma sosiologis; dan 3) paradigma konstruktif. Dari klasifikasi di atas, nampaknya Thomas Kuhn mengartikan paradigma sebagai suatu keseluruhan kepercayaan, nilai-nilai secara teknik yang sama-sama dipakai oleh anggota komunitas ilmuwan tertentu (Ritzer, 1980 : 4-5).

Robert Frederichs adalah ilmuwan pertama yang mencoba merumuskan pengertian paradigma ini secara lebih jelas. Ia merumuskan paradigma sebagai suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) yang semestinya dipelajarinya (a fundamental image a discipline has of its subject matter).

George Ritzer, dengan mensintesakan pengertian paradigma yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn, Master Man dan Robert Frederichs mencoba merumuskan pengertian paradigma itu secara lebih baik. Menurutnya, paradigma adalah pandangan mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam suatu cabang ilmu menurut versi ilmuwan bersangkutan. Dengan demikian paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang musti dijawab, bagaimana mesti men-

jawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam persoalan dari cabang ilmu itu; adanya kesamaan metode serta instrumen yang digunakan sebagai peralatan analisa.

Dengan demikian paradigma merupakan suatu konsensus yang terluas yang terdapat dalam suatu cabang ilmu pengetahuan yang membedakan antara komunitas ilmuwan atau sub-komunitas yang satu dengan yang lainnya. Paradigma menggolong-golongkan, merumuskan dan menghubungkan; exemplar, teori-teori, dan metode-metode. Maka dengan mendasari pemikiran di atas, paradigma berfungsi :

- Memperluas fakta-fakta yang oleh paradigma tertentu dianggap penting.
- Meningkatkan tingkat keperpaduan/keserasian antara fakta-fakta yang satu dengan apa yang dipredikasi oleh paradigma.
- Artikulasi lebih lanjut dari suatu paradigma (Ritzer 1980 : 7 - 8).

Keseluruhan uraian di atas memberi peluang yang lebih luas untuk menyimpulkan bahwasannya dalam satu ilmu pengetahuan tertentu, nampaknya dimungkinkan terdapatnya beberapa paradigma. Artinya dimungkinkan terdapat beberapa komunitas ilmuwan yang masing-masing berbeda titik tolak pandangannya tentang apa yang (menurutnya) menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari dan diselidiki oleh Cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Bahkan di dalam satu komunitas ilmuwan tertentu, dimungkinkan pula terdapat beberapa sub-komunitas ilmuwan tertentu. Gejala yang diutarakan di atas bisa demikian pula berlaku terhadap ilmu Kepolisian, persoalannya sekarang adalah kenapa timbul bermacam-macam paradigma dalam ilmu tersebut? George Ritzer menjelaskan bahwa hal tersebut dapat disebabkan tiga faktor, yaitu : pertama karena dari semula pandangan filosofis yang mendasari pemikiran ilmuwan tentang apa yang semestinya menjadi substansi dari ilmu yang dipelajari berbeda; kedua, sebagai konsekuensi logis dari pandangan filsafat yang berbeda maka teori yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing komunitas ilmuwan itu berbeda; ketiga, metoda yang digunakan untuk memahami substansi ilmu itu juga berbeda.

3. Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Multi Paradigma.

Dalam terminologi ilmu sosial biasanya paradigma yang dianggap dominan dalam pendekatan teoritis. Pertama, apa yang disebut dengan struktural fungsional dengan tokohnya yang terkenal Durkheim, Talkot Parson; kedua, apa yang dinamakan dengan konflik (political economic) dengan gemongnya Karl Marx (Rias Hasan, 1984 : 14). Namun dalam pembagian yang populer, biasanya hanya dibagi dalam dua pendekatan. Pertama, apa yang disebut dengan integration approach, order approach, equilibrium approach. Kedua, apa yang disebut dengan conflict approach yang di dalamnya ada strukturalist non-marxist (Nasikun, 1994: 9 - 17).

Dengan mengacu kepada apa yang dilakukan oleh George Ritzer dengan membagi paradigma ilmu sosial (baca sosiologi) ke dalam tiga katagori; Pertama, paradigma pakta sosial; kedua, paradigma definisi sosial; ketiga, paradigma perilaku sosial. Masing-masing paradigma seperti apa yang dimaksud Ritzer, dapat digunakan untuk mengkaji secara lebih rinci terhadap ilmu Kepolisian.

Ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu objek menurut metode-metode tertentu yang merupakan suatu kesatuan sistematis, sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia (Rusidi, 1985). Lebih terperinci Rusidi menjelaskan bahwa *pengetahuan* adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pemikiran dengan kenyataan atau pemikiran lain berdasarkan pengalaman berulang-ulang tanpa pemahaman sebab akibat yang hakiki dan universal, sehingga ilmu dapat dikatakan merupakan bagian dari pengetahuan, ilmu sering pula dikatakan sebagai pengetahuan ilmiah.

4. P e n u t u p

Dengan mendasari pemikiran tersebut di atas, pertanyaan penting dalam ilmu sosial adalah : *"Apa yang bisa membentuk pemahaman secara tepat terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan bagaimana pemahaman seperti itu bisa*

terwujud?" Krathwohl dalam tulisannya tentang : "Social and Behavioral Science Research" terbit 1985 membahas masalah ini secara mendalam. Di antara pandangan yang diketengangkannya adalah bahwa cara berorientasi seseorang terhadap ilmu pengetahuan menyebabkan metode riset yang digunakannya dan kriteria-kriteria yang berbeda yang digunakannya menghasilkan orientasi yang berbeda pula. Maka dari itu dengan terlembaganya program Pasca Sarjana bidang kajian ilmu Kepolisian di PTIK, hal ini menyongsong harapan lahirnya para pakar ilmu Kepolisian sebagai peneliti dan ilmuwan yang berwawasan sosial ilmiah yang tidak terkukung dengan struktur dokmatis tetapi para ilmuwan polisi yang memiliki pandangan "value-free". Teori-teori ilmu sosial sangat luas dan masing-masing bidang kajian hingga kini masih saling mempertukarkan landasan teori yang digunakan dalam mengupas fenomena sosial tergantung pada area studi atau unit analisis yang akan diamati, seperti halnya ilmu komunikasi, psikologi sosial, kriminologi dll.

Usaha para perintis Program Pasca Sarjana PTIK yang telah dimulai sejak bapak Soedarto sebagai gubernur dan Profesor Harsya Bachtiar sebagai dekan, dengan para perwira stafnya pada waktu itu bapak Masturan, Chairudin Ismail, Bey Laksmarna, Tjoek-Sugiarso, DPM Sitompul hingga bapak Hutagalung selaku gubernur PTIK saat ini bersama staf dan yang tidak dapat dilupakan oleh siapapun adalah bapak Profesor Awaloedin Djamin tentu akan menjadi tonggak sejarah bagi PTIK didalam proses perkembangan ilmu Kepolisian secara ilmiah.

Akhirnya, tulisan saya ini tentunya masih jauh dari kebenaran ilmiah, ini hanya dilandasi akan simpati saya atas terselenggaranya program S2 di PTIK, saya tahu banyak alumnus yang lebih cemerlang untuk itu tentu dilain kesempatan ada karya tulis yang lebih baik. Sekali lagi selamat untuk PTIK dalam menyelenggarakan Program Pasca Sarjana bidang kajian ilmu Kepolisian.

Penulis adalah : Dosen Sespim Polri.